



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERMASALAHAN PENGANGKATAN GURU ASN PPPK

Anin Dhita Kiky Amrynudin
Analisis Legislatif Ahli Pertama
anin.amrynudin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemenuhan kebutuhan guru sepanjang dua tahun terakhir masih belum maksimal. Hal ini disebabkan guru ASN berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dan akan diangkat masih kurang dari 50% dari kebutuhan yang mencapai 1,244 juta guru. Adapun persoalan terkait pengangkatan guru ASN PPPK yakni pertama, akumulasi kekurangan guru ASN PPPK tetap terjadi meski ada pengangkatan pada 2021-2022 sebanyak 544.180 guru. Pemerintah Pusat menyatakan masalah tersebut disebabkan hasil pengajuan formasi dari pemda selalu jauh dari target. Pengumuman kelulusan oleh Panselnas pada setiap tahap juga selalu menyisakan formasi yang kemudian diakumulasikan untuk kuota ke tahap berikutnya.

Kedua, pembatalan sepihak penempatan kelulusan 3.043 guru prioritas 1 (P1) di berbagai daerah yang tertuang dalam Pengumuman Nomor 119/B/GT.00.08/2023 tentang Pembatalan Penempatan Pelamar Prioritas 1 (P1) pada Seleksi Guru ASN-PPPK Tahun 2022. Guru P1 adalah guru yang lulus nilai ambang batas yang ditetapkan atau *passing grade* sejak 2021. Masalah terjadi manakala pada saat seleksi tahap 3 pada akhir 2022 dinyatakan mendapatkan tempat/sekolah di daerah masing-masing namun melalui pengumuman di laman <https://sscan.bkn.go.id> yang mendahului pengumuman kelulusan seleksi ASN PPPK pada 10 Maret 2023 penempatan ribuan guru honorer tersebut dibatalkan dengan alasan adanya sanggahan oleh pelamar P1 yang berdampak pada perubahan status 3.043 pelamar P1 dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Para guru yang mendapatkan informasi tersebut merasa kebingungan karena tidak mengerti alasan pembatalan, di akun para guru tersebut selama ini tidak ada pengajuan sanggahan atau mengetahui tentang masa sanggah bahkan akun para guru terkunci. Ketua PB PGRI mengatakan keputusan Kemendikbudristek merupakan bentuk ketidakprofesionalan dari Kemendikbudristek dan Panselnas.

Ketiga, adanya ketidaksetaraan antara guru negeri dan guru swasta/madrasah dalam seleksi guru ASN PPPK. Jumlah guru dan tenaga pengajar tidak tetap 2020 Kemendikbud adalah 989.629 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, sementara di Kementerian Agama terdapat 624.558 guru di RA, MI, MTs, dan MA (yang terdiri atas guru bantu, guru honorer daerah dan guru tidak tetap). Perwakilan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) menyebut guru swasta dinomorduakan oleh pemerintah, guru swasta baru dapat mengikuti seleksi ASN PPPK setelah guru sekolah negeri menjalani tes. Selain itu, terdapat ketentuan guru PPPK harus mengajar di sekolah milik pemerintah, akibatnya banyak sekolah swasta yang mendadak kehilangan guru bersertifikasi pendidik, sebab para guru swasta harus berpindah ke sekolah negeri, padahal jumlah guru swasta yang lolos nilai ambang batas hampir 40.000 orang.

Atensi DPR

Saat ini Komisi II DPR RI sudah mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait Penyelesaian Tenaga Honorer termasuk Guru. Sehingga melalui Pansus tersebut dapat melakukan Rapat Kerja Gabungan dengan mengundang dan meminta penjelasan Kemenpan-RB; Kementerian Dalam Negeri; BKN; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Agama; dan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkatan guru PPPK yang selalu terjadi permasalahan di setiap tahap pengangkatannya. Selain itu, perlu membahas *roadmap* manajemen pengangkatan guru PPPK baik guru di sekolah negeri maupun swasta serta solusi untuk melakukan percepatan penyelesaian guru PPPK yang telah lulus seleksi. Sedangkan melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI juga perlu segera melanjutkan pembahasan revisi UU ASN.

Sumber

Kompas, 7, 18, dan 20 Maret 2023.